

FORUM OF ASIA PACIFIC PARLIAMENTARIANS FOR EDUCATION  
(FASPPED)

The 1<sup>st</sup> Executive Bureau Meeting  
Gedung Nusantara III - Komplek DPR RI  
Jakarta, 9 Juni 2009

Siaran Pers

Pada tanggal 9 Juni 2009, DPR RI telah melaksanakan Sidang Executive Bureau Forum of Asia Pacific Parliamentarians for Education (FASPPED) yang pertama. Sidang tersebut dihadiri oleh para anggota *Executive Bureau* dari Korea Selatan dan Samoa serta perwakilan dari UNESCO Paris dan UNESCO Jakarta. Sidang dipimpin oleh Ketua DPR RI, yang menjabat sebagai Presiden FASPPED periode 2008-2010. Forum ini terbentuk pada bulan Oktober 2008 menyusul diadakannya Parliamentary Conference for Education in the Asia-Pacific Region di Jakarta. Tujuan utama dibentuknya forum ini adalah untuk meningkatkan kepedulian anggota parlemen terhadap tantangan-tantangan dalam bidang pendidikan di wilayahnya masing-masing sekaligus juga untuk mendukung pencapaian program *Education for All* (EFA) yang dicanangkan oleh UNESCO pada tahun 1990 yang mengamanatkan pencapaian 6 tujuan EFA, di antaranya pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar menyeluruh, pemberantasan tuna aksara dan kesetaraan gender di institusi pendidikan pada 2015.

Dalam pidato pembukaan sidang, Presiden FASSPED menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan membentuk generasi muda harapan bangsa. Oleh karena itu, parlemen sudah selayaknya memberi dukungan penuh untuk bidang pendidikan melalui perannya dalam membuat UU dan mengesahkan penggunaan anggaran serta mengawasi kebijakan pendidikan yang dilakukan pemerintah. Selain itu Presiden FASPPED juga menyatakan kesiapan DPR RI untuk menjadi tuan rumah Sidang Umum FASPPED yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2010. Agenda sidang yang pertama ini membahas mengenai tantangan yang dihadapi berbagai sub-region di Asia Pasifik dalam mencapai ke-6 target dari EFA. Selain itu sidang juga membahas masalah

administrasi dan hal-hal yang terkait dengan penguatan sistem keorganisasian FASPPED yang baru terbentuk tersebut.

Perwakilan dari UNESCO Paris dalam presentasinya menyatakan bahwa tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah minimnya anggaran untuk pendidikan terutama sejak krisis energi, pangan dan finansial melanda dunia. Banyak negara yang memutuskan untuk memotong anggaran pendidikan meskipun sektor pendidikan tidak kalah penting dengan sektor lainnya. Dalam kesempatan ini disampaikan pula mengenai 35<sup>th</sup> UNESCO General Conference yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2009 dan peran aktif parlemen dalam *event* tersebut. Selain itu UNESCO juga menyatakan amat terkesan dengan usaha maksimal yang ditampilkan oleh DPR RI sejak terbentuknya FASPPED.

Untuk dapat lebih memahami tantangan yang dihadapi, setiap negara yang mewakili *sub-region* di Asia-Pasifik memperoleh kesempatan untuk mempresentasikan *progress* dari program EFA di wilayahnya. Setelah melalui diskusi yang sangat interaktif, disimpulkan beberapa rekomendasi untuk dibawa ke Sidang Umum FASPPED. Rekomendasi tersebut antara lain, *pertama* mendorong pembentukan komisi yang membidangi masalah pendidikan di parlemen negara-negara anggota FASPPED yang belum seluruhnya memiliki komisi terkait, *kedua* mengupayakan pembentukan UU khusus mengenai dukunagn terhadap kinerja guru-guru di daerah terpencil terutama terkait dengan insentif yang diberikan dan *ketiga* penguatan kerjasama antara parlemen, pemerintah dan organisasi-organisasi masyarakat madani.

Selain itu, Sidang juga menyetujui diadakannya beberapa workshop bagi anggota FASPPED sebagai agenda tambahan dari Sidang Umum. Tema dari workshop tersebut terkait dengan pengawasan dan evaluasi dari dana pendidikan baik yang bersumber dari APBN maupun pihak donor, pendidikan yang merangkul semua kalangan dan peningkatan koordinasi di antara

stakeholders EFA sehingga progress yang dicapai tidak mengalami kemunduran akibat krisis. Usulan tema-tema tersebut merupakan usulan DPR RI.

Peran serta aktif dalam FASPPED semakin memantapkan keseriusan dan komitmen DPR RI dalam bidang pendidikan. Setelah memperkuat inisiatif di dalam negeri, antara lain melalui pengesahan kenaikan anggaran untuk pendidikan sebanyak 20 persen dari APBN dan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta pengesahan UU Guru dan Dosen, DPR RI kali ini menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas dan akses terhadap pendidikan di kawasan Asia Pasifik.

Jakarta, 10 Juni 2009

Pimpinan BKSAP

Wakil Ketua

(Tosari Widjaja)